

**EFEKTIVITAS PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH OLEH DLH KOTA
SEMARANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI
KECAMATAN SEMARANG BARAT**

Muhammad Maulana Akbar¹, Teguh Yuwono²
Email: muhammadmaulanaakbar72@gmail.com

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro**
Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50319
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505
Laman: <https://fisip.undip.ac.id/id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Semarang masih ditandai oleh tingginya volume timbulan sampah, rendahnya pemilahan dari sumber, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat. Kecamatan Semarang Barat merupakan wilayah dengan tingkat timbulan sampah dan pelanggaran pengelolaan sampah yang tinggi sehingga diperlukan evaluasi terhadap efektivitas program pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas program pengelolaan sampah wilayah, mengkaji sinergi pemerintah dan pemangku kepentingan, serta menilai peran kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Penelitian menggunakan metode mixed methods dengan desain sequential explanatory melalui kuesioner yang diperdalam dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengelolaan sampah berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, pengembangan bank sampah, dan pelayanan pengangkutan. Namun, efektivitas program belum optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya konsistensi pemilahan sampah, serta belum kuatnya sinergi antarpemangku kepentingan. Disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga memerlukan penguatan tata kelola kolaboratif, peningkatan kapasitas infrastruktur, konsistensi pemilahan dari sumber, dan pengawasan berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas; Pengelolaan Sampah; DLH Kota Semarang; Sampah Rumah Tangga; Kecamatan Semarang Barat.

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Household waste management in Semarang City remains a challenge, characterized by high waste generation, low levels of waste segregation at source, limited facilities and infrastructure, and suboptimal community participation. West Semarang District has high levels of waste generation and waste management violations, necessitating an evaluation of the effectiveness of the waste management program implemented by the Semarang City Environmental Agency. This study aims to analyze the effectiveness of the regional waste management program, examine the synergy between the government and stakeholders, and assess the institutional role of the Environmental Agency in household waste management. The study employed a mixed methods approach with a sequential explanatory design, using questionnaires supplemented by interviews, observation, and documentation. The results indicate that the waste management program has contributed to increasing public awareness through outreach activities, waste bank development, and waste collection services. However, its effectiveness remains suboptimal due to limited facilities and infrastructure, low consistency in waste segregation, and weak stakeholder synergy. It is concluded that effective household waste management requires strengthened collaborative governance, increased infrastructure capacity, consistent waste segregation at source, and ongoing monitoring.

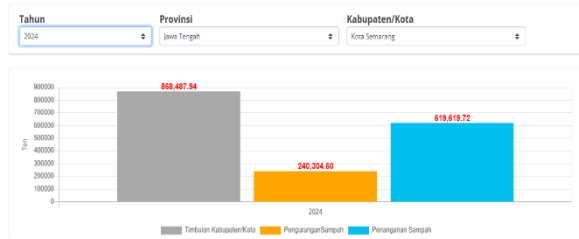
Keywords: *Effectiveness; Waste Management; Semarang City Environmental Agency; Household Waste; West Semarang District*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah rumah tangga masih menjadi salah satu persoalan dalam penyelenggaraan lingkungan perkotaan. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tingginya timbulan sampah, tetapi juga rendahnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan fasilitas pengelolaan, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah memerlukan upaya pengurangan dan penanganan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Persoalan tersebut juga tercermin di Kota Semarang. Kota Semarang memiliki

lebih dari 1,7 juta penduduk pada tahun 2024 dengan luas wilayah 373,78 km² yang terdiri atas 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Tingginya jumlah penduduk berbanding lurus dengan meningkatnya volume sampah yang dihasilkan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang tahun 2024, total timbulan sampah mencapai 868.487,94 ton, sedangkan sampah yang berhasil dikurangi sebesar 240.304,60 ton atau 27,67%. Sampah yang belum dikurangi masih ditangani melalui pengangkutan menuju TPA Jatibarang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengurangan sampah dari sumber masih menjadi persoalan dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang (Pramesti et al., 2023).



Data komposisi sampah Kota Semarang tahun 2024 menunjukkan bahwa sampah rumah tangga merupakan sumber timbulan terbesar, yaitu 72%. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya pemilahan dan pengelolaan sampah sejak dari sumber, terutama pada tingkat rumah tangga. Pada sisi lain, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumber masih menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan (Saputra et al., 2022).

Dalam merespons persoalan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang melaksanakan berbagai program pengelolaan sampah. Penelitian ini memfokuskan analisis pada *Focus Group Discussion* (FGD) Pemilahan Sampah dan Pendampingan Bank Sampah, karena kedua program tersebut secara langsung berkaitan dengan upaya pemilahan dan pengelolaan sampah pada tingkat masyarakat (Wahyuni, 2024).

Efektivitas program kemudian dilihat dalam keterhubungannya dengan pelayanan persampahan yang diterima masyarakat, mulai dari pemilahan di sumber,

pengumpulan, pengangkutan, hingga pengawasan.

Salah satu wilayah yang menghadapi persoalan pengelolaan sampah rumah tangga adalah Kecamatan Semarang Barat. Berdasarkan data tahun 2024, wilayah ini memiliki timbulan sampah sebesar 150 ton per hari, dua TPST, enam bank sampah aktif, tingkat pemilahan sampah rumah tangga sebesar 20%, dan 95 kasus pelanggaran sampah rumah tangga. Kecamatan Semarang Barat berada pada urutan pertama dalam daftar kecamatan dengan permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga.

Permasalahan tersebut juga terlihat pada tingkat kelurahan. Penelitian ini menelaah kondisi Kelurahan Gisikdrono dan Kelurahan Kalibanteng Kulon untuk melihat pelaksanaan pengelolaan sampah pada tingkat masyarakat. Selain persoalan pemilahan, ditemukan pula persoalan kesinambungan pengelolaan ketika sampah yang telah dipilah di tingkat rumah tangga kembali tercampur pada proses pengangkutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh kesinambungan sarana, layanan, dan koordinasi dalam setiap tahapan pengelolaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program FGD Pemilahan Sampah dan Pendampingan Bank Sampah oleh DLH Kota Semarang, mengkaji sinergi antara DLH, masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal, serta menganalisis peran kelembagaan DLH dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Semarang Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*) dengan desain *Explanatory Sequential*, yaitu pengumpulan dan analisis data kuantitatif yang dilanjutkan dengan data kualitatif untuk memperdalam dan menjelaskan hasil kuantitatif (Sugiyono, 2018). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis efektivitas program pengelolaan sampah wilayah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Semarang Barat.

Populasi penelitian adalah masyarakat penerima layanan pengelolaan sampah di Kecamatan Semarang Barat, dengan fokus pada Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Gisikdrono. Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (*error tolerance*) 10%:

$$n = N / (1 + N(e)^2)$$

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh 60 responden, yang terdiri atas 42 responden (70%) di Kelurahan Kalibanteng Kulon dan 18 responden (30%) di Kelurahan Gisikdrono dan sekitarnya melalui Proportional Random Sampling. Informan kualitatif dipilih dengan Purposive Sampling berdasarkan kriteria, kewenangan, dan relevansi keterlibatannya dalam penelitian.

Data kuantitatif diperoleh melalui kuesioner tertutup berskala Likert 1–5 yang terdiri atas 15 pernyataan berdasarkan lima dimensi efektivitas, yaitu ketercapaian tujuan, efisiensi, ketepatan sasaran, efektivitas atau responsivitas, dan keberlanjutan. Kelima dimensi tersebut digunakan untuk melihat efektivitas program sekaligus keterhubungannya dengan pelayanan persampahan yang diterima masyarakat pada tahap pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengawasan. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan sumber relevan lainnya.

Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif melalui perhitungan nilai rata-rata (*mean*) pada setiap indikator dengan bantuan *Microsoft Excel*. Data kualitatif dianalisis

menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selanjutnya, kedua jenis data diintegrasikan untuk memperoleh pemahaman mengenai efektivitas program. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Efektivitas Program Pengelolaan Sampah Wilayah oleh DLH Kota Semarang

Efektivitas program pengelolaan sampah wilayah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang dianalisis berdasarkan lima dimensi, yaitu ketercapaian tujuan, efisiensi, ketepatan sasaran, efektivitas atau responsivitas, dan keberlanjutan. Kelima dimensi tersebut digunakan untuk melihat keterhubungan pelaksanaan program dengan pelayanan persampahan yang diterima masyarakat.

Pengukuran dilakukan terhadap 60 responden melalui 15 butir pertanyaan dengan skala Likert. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa secara keseluruhan efektivitas program memperoleh nilai rata-rata 3,89 dan termasuk dalam kategori efektif. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa secara keseluruhan efektivitas

program memperoleh nilai rata-rata 3,89 dan termasuk dalam kategori efektif.

Dimensi	Mean	Kategori
Ketercapaian Tujuan	3,93	Efektif
Efisiensi	3,68	Efektif
Ketepatan Sasaran	4,24	Sangat Efektif
Efektivitas/Responsivitas	3,85	Efektif
Keberlanjutan	3,76	Efektif
Rata-rata	3,89	Efektif

Dimensi ketercapaian tujuan memperoleh nilai rata-rata 3,93. Nilai tersebut ditunjukkan antara lain melalui penilaian masyarakat terhadap ketiadaan penumpukan sampah yang berbau dengan nilai 3,86 dan praktik pemilahan sampah organik dan anorganik di rumah dengan nilai 4,00. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tujuan program telah dirasakan dalam aspek kebersihan lingkungan dan mulai terlihat dalam perilaku pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.

Pada dimensi efisiensi, nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3,68. Aksesibilitas lokasi TPS atau kontainer dari rumah memperoleh nilai 3,41, sedangkan kondisi kelayakan fisik armada pengangkut memperoleh nilai 3,85 dan kewajaran iuran dengan kualitas pelayanan memperoleh nilai 3,78. Nilai tersebut menunjukkan bahwa aspek efisiensi layanan masih dipengaruhi

oleh persoalan akses terhadap fasilitas persampahan.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa keterbatasan lahan menjadi salah satu persoalan di Kelurahan Kalibanteng Kulon. Ketiadaan lokasi penampungan yang memadai menyebabkan pengumpulan sampah dilakukan melalui pola direct hauling, yaitu pemindahan sampah dari gerobak tingkat lingkungan secara langsung ke armada truk DLH. Kondisi tersebut membuat kelancaran pelayanan sangat bergantung pada ketersediaan dan ketepatan waktu armada pengangkut.

Dimensi ketepatan sasaran memperoleh nilai tertinggi, yaitu 4,24 dan termasuk kategori sangat efektif. Indikator sosialisasi pemilahan sampah oleh DLH atau kelurahan memperoleh nilai 4,17, sedangkan pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan bank sampah memperoleh nilai 4,32. Temuan ini menunjukkan bahwa program edukasi dan pendampingan telah menjangkau masyarakat sebagai sasaran program. Keberadaan kegiatan sosialisasi dan bank sampah telah memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah.

Lebih lanjut, dimensi efektivitas atau responsivitas memperoleh nilai 3,85.

Rutinitas petugas mengambil sampah memperoleh nilai 4,00, kesesuaian jadwal pengangkutan 3,85, kebersihan dan kenyamanan TPS 3,90, sedangkan kecepatan respons terhadap keluhan memperoleh nilai 3,66. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan pengumpulan sampah secara rutin telah dirasakan masyarakat, tetapi respons terhadap keluhan masih memiliki ruang perbaikan.

Dimensi keberlanjutan memperoleh nilai rata-rata 3,76. Pemantauan langsung oleh petugas DLH atau kelurahan memperoleh nilai 3,51 dan menjadi salah satu indikator dengan nilai relatif rendah. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan kualitatif bahwa pengawasan belum sepenuhnya dirasakan secara konsisten oleh masyarakat. Di sisi lain, kepatuhan warga membayar iuran atau retribusi memperoleh nilai 4,14 dan pengetahuan mengenai sarana pelaporan keluhan memperoleh nilai 3,90.

Efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kegiatan FGD Pemilahan Sampah dan Pendampingan Bank Sampah, tetapi juga oleh keterhubungan antara edukasi, pemilahan di sumber, ketersediaan fasilitas, pengumpulan, pengangkutan, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek edukasi dan ketepatan sasaran telah

memperoleh penilaian relatif tinggi, sementara persoalan fasilitas, aksesibilitas, logistik, dan pengawasan masih menjadi bagian yang memengaruhi efektivitas layanan.

Sinergi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Semarang Barat

Pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Semarang Barat melibatkan beberapa aktor yang memiliki fungsi berbeda, yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang, pemerintah kelurahan, pengelola bank sampah, dan masyarakat. Dalam operasionalisasi konsep penelitian, sinergi dianalisis melalui pemetaan jejaring aktor, pola koordinasi antar-lembaga, serta inovasi sosial berbasis wilayah. Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pelaksanaan pelayanan oleh DLH, tetapi juga pada keterlibatan aktor di tingkat kelurahan dan masyarakat.

Aktor	Peran
DLH Kota Semarang	Pengangkutan sampah, penyediaan regulasi, dan fasilitasi sosialisasi
Pemerintah Kelurahan	Sosialisasi lanjutan dan fasilitasi usulan masyarakat
Pengelola Bank Sampah	Menggerakkan pemilahan, penimbangan,

	dan pengelolaan sampah di tingkat RT/RW
Masyarakat	Melakukan pemilahan sampah dan memenuhi kewajiban pelayanan persampahan

Berdasarkan tabel tersebut, pembagian fungsi antaraktor pada dasarnya telah terbentuk. DLH menjalankan fungsi utama pada pelayanan persampahan dan pengangkutan, sedangkan pemerintah kelurahan berperan dalam meneruskan sosialisasi kepada masyarakat. Pengelola bank sampah menjadi penggerak pengelolaan sampah berbasis masyarakat, sementara masyarakat merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan proses pemilahan dan pengumpulan sampah dari sumber.

Pembagian tersebut sejalan dengan pendekatan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat yang menempatkan masyarakat dan bank sampah sebagai bagian dari proses pengurangan sampah dari sumber. Dalam penelitian ini, bank sampah diposisikan sebagai salah satu bentuk inisiatif masyarakat yang membutuhkan dukungan dan pendampingan agar dapat menjalankan fungsi pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Meskipun pembagian peran telah terbentuk, hasil penelitian menunjukkan

bahwa koordinasi horizontal antaraktor belum berjalan secara optimal. DLH, kecamatan, dan kelurahan telah memiliki hubungan koordinatif dalam pelaksanaan program, tetapi komunikasi antarpengelola bank sampah pada tingkat kecamatan belum berlangsung melalui forum rutin. Berdasarkan hal tersebut, hubungan yang terbentuk lebih terlihat sebagai pembagian tugas berdasarkan fungsi masing-masing dibandingkan sebagai mekanisme kolaborasi yang berlangsung secara intensif dan terstruktur.

Kondisi tersebut juga terlihat dari perbedaan antara Kelurahan Gisikdrono dan Kelurahan Kalibanteng Kulon. Gisikdrono menunjukkan dukungan kelembagaan lokal yang lebih aktif melalui keterlibatan PKK, kepemimpinan kelurahan, kegiatan komposting, budidaya maggot, dan dukungan pihak swasta. Sebaliknya, Kalibanteng Kulon masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan lahan sehingga kegiatan bank sampah belum berjalan secara penuh. Perbedaan kondisi tersebut dapat dilihat berdasarkan tabel berikut.

Aspek	Gisikdrono	Kalibanteng Kulon
Kelembagaan lokal	Aktif melalui kelurahan dan PKK	Masih terbatas
Partisipasi masyarakat	Tinggi dalam kegiatan	Masih terbatas

	pengelolaan sampah	
Inovasi	Komposting, maggot, dan “ASN Wajib Nyampah”	Pengelolaan masih menghadapi keterbatasan fasilitas
Dukungan eksternal	Terdapat dukungan CSR	Dukungan sarana masih terbatas
Kendala utama	Menjaga keberlanjutan kegiatan	Keterbatasan lahan dan fasilitas

Dalam wilayah kelurahan Gisikdrono, sinergi berkembang melalui keterlibatan aktor lokal dan dukungan pihak eksternal. Penelitian mencatat kegiatan komposting dan budidaya maggot serta program “ASN Wajib Nyampah” yang didorong oleh pemerintah kelurahan. Wilayah tersebut juga memperoleh dukungan CSR dari pihak swasta.

Sebaliknya, di Kalibanteng Kulon, pengelolaan bank sampah masih menghadapi persoalan fasilitas dan lahan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan bank sampah belum berjalan secara penuh dan masih dilakukan secara kolektif. Keterbatasan fasilitas bahkan menyebabkan proses penimbangan sampah memanfaatkan fasilitas milik pihak ketiga.

Sinergi yang terbentuk di Kecamatan Semarang Barat telah melibatkan pembagian peran antara pemerintah dan masyarakat, tetapi tingkat pelaksanaannya berbeda

antarwilayah. Perbedaan tersebut berkaitan dengan kapasitas kelembagaan lokal, kepemimpinan wilayah, ketersediaan fasilitas, serta partisipasi masyarakat.

Temuan ini memperlihatkan bahwa keberadaan pembagian tugas saja belum cukup untuk menghasilkan pola pengelolaan yang seragam, karena keberlanjutan kegiatan juga dipengaruhi oleh kemampuan aktor di tingkat lokal dalam menggerakkan masyarakat dan menghubungkan dukungan dari berbagai pihak.

Peran Kelembagaan DLH Kota Semarang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Peran kelembagaan DLH Kota Semarang dalam penelitian ini dianalisis melalui tiga aspek, yaitu fungsi regulasi dan edukasi, penyediaan sarana prasarana dan armada, serta pengawasan dan penegakan regulasi. Ketiga aspek tersebut merupakan indikator yang telah ditetapkan dalam operasionalisasi konsep penelitian untuk melihat kapasitas institusional DLH dalam memfasilitasi pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga sampai dengan proses pengangkutan.

Pada aspek regulasi dan edukasi, DLH berperan dalam memberikan sosialisasi pemilahan sampah serta

melakukan pendampingan terhadap bank sampah. Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah juga berkaitan dengan dukungan kelembagaan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (Suwondo, 2020). Peran tersebut penting karena pengelolaan sampah berbasis rumah tangga membutuhkan perubahan perilaku sejak dari sumber.

Hasil penelitian kuantitatif memperlihatkan bahwa indikator sosialisasi pemilahan sampah memperoleh nilai 4,17 dan pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan bank sampah memperoleh nilai 4,32. Fungsi edukasi menjadi salah satu bagian yang memperoleh penilaian relatif tinggi dalam penelitian.

Fungsi tersebut juga ditempatkan dalam kerangka kebijakan pengelolaan sampah Kota Semarang. Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah disebut sebagai salah satu dasar pelaksanaan pengelolaan sampah dan kerja sama dengan masyarakat serta pihak swasta.

Pada aspek sarana prasarana dan armada, peran DLH terlihat dalam penyelenggaraan pelayanan pengangkutan dan penyediaan fasilitas pendukung. Namun, penelitian menemukan bahwa ketersediaan

fasilitas masih menjadi persoalan di wilayah tertentu. Kelurahan Kalibanteng Kulon, misalnya, menghadapi keterbatasan lahan untuk fasilitas persampahan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengumpulan menggunakan pola direct hauling, yaitu sampah dari tingkat lingkungan dipindahkan langsung menuju armada truk DLH.

Persoalan fasilitas tersebut kemudian berhubungan dengan kapasitas operasional armada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rutinitas pengambilan sampah memperoleh nilai 4,00 dan kondisi kelayakan fisik armada memperoleh nilai 3,85. Namun, beberapa indikator yang berkaitan dengan responsivitas memperoleh nilai lebih rendah, yaitu kecepatan respons terhadap keluhan sebesar 3,66, pemantauan langsung oleh petugas DLH atau kelurahan sebesar 3,51, dan pemberitahuan apabila terjadi keterlambatan sebesar 3,49.

Indikator	Mean	Kategori
Rutinitas pengambilan sampah	4,00	Efektif
Kesesuaian jadwal pengangkutan	3,85	Efektif
Kondisi fisik armada	3,85	Efektif
Respons terhadap keluhan	3,66	Efektif
Pemantauan petugas DLH/Kelurahan	3,51	Efektif
Pemberitahuan keterlambatan	3,49	Cukup

		Efektif
--	--	---------

Data tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara pelaksanaan pelayanan rutin dengan responsivitas dan pengawasan. Pengangkutan sampah secara rutin telah memperoleh penilaian efektif, tetapi indikator komunikasi keterlambatan, respons keluhan, dan pemantauan memperoleh nilai yang relatif lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran kelembagaan DLH tidak hanya berkaitan dengan terselenggaranya pengangkutan, tetapi juga dengan kemampuan menjaga kesinambungan komunikasi dan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan.

Pada aspek pengawasan dan penegakan regulasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemantauan langsung oleh petugas DLH atau kelurahan memperoleh nilai 3,51. Dalam praktiknya, penanganan pelanggaran persampahan lebih banyak dilakukan melalui teguran dan pemberian pemahaman kepada masyarakat. Pengurus lingkungan di Gisikdrono maupun Kalibanteng Kulon juga menyampaikan bahwa mereka belum menerapkan sanksi atau denda secara langsung terhadap warga yang membuang atau membakar sampah secara sembarangan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan telah dijalankan, tetapi pelaksanaannya lebih banyak menggunakan pendekatan persuasif. Dengan demikian, keberadaan regulasi belum secara otomatis menghasilkan pelaksanaan pengawasan yang sama kuat pada setiap tingkat wilayah. Fungsi DLH masih membutuhkan dukungan pemerintah kelurahan dan masyarakat sebagai pelaksana serta pengawas pada tingkat lingkungan.

Persoalan pada kesinambungan antara pemilahan di tingkat rumah tangga dengan proses pengangkutan. Skripsi mencatat adanya fenomena *remixing*, yaitu kondisi ketika sampah yang sebelumnya telah dipilah dapat kembali tercampur dalam proses pengangkutan karena keterbatasan sarana pengangkutan yang memiliki pemisahan antara sampah organik dan anorganik. Dalam konteks ini, persoalan kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan pemberian instruksi kepada masyarakat untuk memilah, tetapi juga dengan kemampuan menyediakan sistem pendukung agar pemilahan tersebut tetap terjaga pada tahap berikutnya.

Peran kelembagaan DLH Kota Semarang dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Semarang Barat telah mencakup fungsi edukasi, fasilitasi

pelayanan, pengangkutan, koordinasi, dan pengawasan. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi keterbatasan pada aspek fasilitas, armada, komunikasi pelayanan, serta pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan perilaku masyarakat, tetapi juga dengan kesinambungan dukungan kelembagaan dari tahap pemilahan hingga pengangkutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas Program Pengelolaan Sampah Wilayah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang di Kecamatan Semarang Barat belum optimal, meskipun beberapa aspek telah efektif, seperti pengetahuan masyarakat mengenai bank sampah (4,32), sosialisasi pemilahan sampah (4,17), dan rutinitas pengangkutan sampah (4,00). Namun, keterbatasan sarana, prasarana, dan kendala operasional masih menghambat kesinambungan pengelolaan sampah, termasuk praktik pencampuran kembali (*re-mixing*) sampah yang telah dipilah.

Sinergi pengelolaan sampah telah melibatkan DLH, pemerintah kelurahan,

pengelola bank sampah, dan masyarakat, tetapi belum terstruktur dan setara. Komunikasi horizontal dan forum komunikasi rutin di tingkat kecamatan yang belum optimal menyebabkan perbedaan kapasitas antarkelurahan. Gisikdrono memiliki dukungan kelembagaan dan inovasi sosial yang lebih berkembang, sedangkan Kalibanteng Kulon masih terkendala sarana dan dukungan pengelolaan bank sampah.

Peran kelembagaan DLH meliputi regulasi, edukasi, penyediaan sarana dan armada, serta pengawasan, tetapi masih terbatas dalam mendukung keberlanjutan program di lapangan. Diperlukan penguatan sarana dan prasarana, konsistensi pemilahan, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta pengawasan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Semarang Barat.

SARAN

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang disarankan memperkuat manajemen logistik hilir dan sistem komunikasi publik guna menjaga konsistensi partisipasi masyarakat.

Kecamatan Semarang Barat bersama elemen non-pemerintah disarankan

membentuk Forum Tata Kelola Kolaboratif (*collaborative governance forum*) yang inklusif untuk memperkuat koordinasi dan kemitraan antarpemangku kepentingan.

Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga melalui pendekatan komparatif antarkecamatan atau antardaerah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dalam konteks sosial, kelembagaan, dan kapasitas fiskal yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Pramesti, Pingky Yolanda, Endang Larasati, dan Tri Yuniningsih. (2023). Perencanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Pada TPA Jatibarang. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.
- Saputra, Trio, dkk. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 246. <https://doi.org/10.31258/jkp.v13i3.8073>.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.

Suwondo, Dwi. (2020). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 11–23. <https://doi.org/10.22146/jip.48213>.

Wahyuni, Sri. (2024). Efektivitas Bank Sampah di Kota Semarang dalam Mendukung Program 1000 Bank Sampah. *Jurnal Aplikasi Manajemen Publik*, 3(2), 88–102. <https://journal.kurasinstitute.com/index.php/japamul/article/view/632>.